

Perempuan dalam Pendidikan Madrasah di Aceh dari Perspektif Sejarah

Inayatillah

Abstract

This paper discusses on the women's role in madrasah education in Aceh, as to when Acehnese women had their opportunity to study in madrasah, and why the parents sent them to madrasah education. This study will show that female Acehnese have been involved in madrasah education since the early 20th century, i.e. since the outset of this type of education in the region. The Acehnese women's role in madrasah education shows that women have had access to education since long ago. Their participation in the premise of Islamic education is inseparable from the Islamic values deeply rooted in the people of Aceh. Additionally, this study also found that the Acehnese women were allowed to continue their studies not only within but also outside the Aceh region. Even during the hard times of conflicts, many women have their chance to continue

Inayatillah, Ph.D
adalah Dosen Fakultas
Adab IAIN Ar-Raniri Banda
Aceh. Email:
[inayatillah2020@yahoo.
com](mailto:inayatillah2020@yahoo.com)

Naskah diterima 7
September 2011. Revisi
pertama, 28 September
2011, revisi kedua, 22
Oktober 2011 dan revisi
terakhir 20 Nopember
2011

their education outside the region, such as Medan, Padang, Jakarta, Yogyakarta and other major cities. This shows that the Acehnese practice of migration belongs not only to men but also common to women.

Keywords: *women, madrasah education, historical perspective*

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang bagaimana partisipasi perempuan Aceh dalam pendidikan madrasah, sejak kapan perempuan Aceh memperoleh kesempatan untuk belajar dalam pendidikan madrasah, dan mengapa orang tua di Aceh menyekolahkan anak perempuannya dalam pendidikan madrasah. Kajian ini menunjukkan bahwa perempuan Aceh telah terlibat dalam dunia pendidikan madrasah sejak awal abad ke-20, yaitu sejak pendidikan madrasah ini mulai didirikan di Aceh. Keterlibatan perempuan Aceh dalam dunia pendidikan madrasah menunjukkan bahwa perempuan telah memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pendidikan sejak dulu. Partisipasi perempuan Aceh dalam dunia pendidikan Islam tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai keislaman yang mengakar kuat dalam masyarakat Aceh. Selain itu kajian ini juga menemukan bahwa perempuan Aceh tidak hanya diperbolehkan untuk melanjutkan pendidikannya di sekitar daerah Aceh tetapi juga sampai di luar daerah. Bahkan ketika konflik melanda Aceh, banyak perempuan yang melanjutkan pendidikannya ke luar daerah Aceh, seperti Medan, Padang, Jakarta, Yogyakarta dan kota-kota besar lainnya. Hal ini menunjukkan bahawa tradisi merantau dalam masyarakat Aceh tidak hanya milik kaum laki-laki tetapi tradisi ini juga lazim dilakukan oleh kaum perempuan.

Kata Kunci: *perempuan, pendidikan madrasah, perspektif sejarah*

I. PENDAHULUAN

Eksistensi pendidikan madrasah dalam tradisi pendidikan Islam di Indonesia tergolong fenomena modern karena dimulai sekitar awal abad 20 M. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam berfungsi menghubungkan sistem lama yaitu sistem

pendidikan pesantren (*dayah* di Aceh) dengan sistem pendidikan modern yang diperkenalkan oleh pemerintah Hindia Belanda¹ dengan jalan mempertahankan nilai-nilai lama yang masih baik dan masih dapat dipertahankan dan mengambil sesuatu yang baru dalam bidang ilmu, teknologi dan ekonomi yang bermanfaat bagi kehidupan umat Islam. Oleh karena itu, isi kurikulum madrasah pada umumnya adalah apa yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan Islam tradisional (*dayah* atau pesantren) ditambah dengan beberapa materi pelajaran yang disebut dengan ilmu-ilmu umum [dalam pendidikan sekolah].²

Kajian mengenai pendidikan madrasah di Indonesia, khususnya Aceh selama ini lebih sering membahas tentang sejarah muncul dan berkembangnya pendidikan madrasah, baik itu dalam konteks historis maupun kontemporer.³ Jarang sekali studi ini membahas sisi keterlibatan perempuan dalam pendidikan madrasah. Padahal fakta sejarah menunjukkan bahwa perempuan sudah lama berpartisipasi dalam pendidikan madrasah. Untuk konteks Aceh, perempuan sudah terlibat dalam pendidikan madrasah sejak awal abad ke-20, baik itu sebagai murid maupun tenaga pengajarnya.

¹ Farish A. Noor, et al, (eds.). 2008. "Behind the Walls Re-Appraising the Role and Importance of Madrasas in the World Today" dalam Farish A.Noor, et all, (eds.) *The Madrasa in Asia Political Activism and Transnational Linkages*. Amsterdam: Amsterdam University Press, h. 14.

² Abasri. 2007. "Sejarah dan Dinamika Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Nusantara: Surau, Meunasah, Pesantren dan Madrasah" dalam Samsul Nizar, (ed.), *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*. Jakarta: Kencana, h. 290-291.

³ Ismuha. 1983. "Ulama Aceh dalam Perspektif Sejarah" dalam buku Taufik Abdullah, (ed.), *Agama dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali Press; Baihaqi A.K. 1983. "Ulama dan Madrasah Aceh" dalam Taufik Abdullah. *Agama dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali; Maksum. 1999. *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu; Suwito dan Fauzan. 2005. *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.

Pada masa kontemporer, keterlibatan perempuan dalam pendidikan madrasah semakin besar jumlahnya. Bahkan jika dilihat dari aspek kuantitas murid maka jumlah murid perempuan yang belajar di madrasah lebih banyak dari pada murid laki-laki. Sebagaimana hasil penelitian Oey-Gardiner dan Suleeman yang dikutip oleh Evelyn Suleeman menyatakan bahwa sejak tahun 1974 telah terjadi feminisasi murid madrasah (lebih banyak murid perempuan yang belajar di madrasah). Gejala ini terus terjadi di Indonesia dan di Aceh selama kurun waktu 2003-2006. Untuk tahun 2006, rasio jenis kelamin untuk Aceh 115 murid laki-laki dari 100 murid perempuan di SMP dan 77 murid laki-laki dari 100 murid perempuan di MTs sedangkan 100 murid laki-laki dari 100 murid perempuan di SMA/SMK dan 70 murid laki-laki dari 100 murid perempuan di MA.⁴

Data ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peluang yang besar dalam mengakses pendidikan madrasah. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan madrasah memiliki peran yang cukup signifikan dalam peningkatan pendidikan perempuan di Aceh. Oleh karena itu, tulisan mengenai partisipasi perempuan Aceh dalam pendidikan madrasah ditinjau dari perspektif sejarah akan dapat memberikan penjelasan tentang sejak kapan perempuan dapat mengakses pendidikan madrasah di Aceh. Selain itu kajian ini akan dapat mengungkapkan tentang faktor-faktor yang mendorong perempuan Aceh lebih banyak berpartisipasi dalam pendidikan madrasah daripada sekolah umum.

Artikel ini ditulis untuk mendeskripsikan tentang partisipasi perempuan Aceh dalam pendidikan madrasah dengan menggunakan pendekatan sejarah. Dalam hal ini penulis tidak hanya mengumpulkan data sejarah dari literatur-literatur yang ditulis para ahli sejarah dan antropolog yang mengkaji masyarakat Aceh, perempuan, dan pendidikan madrasah tetapi juga akan dipadukan dengan data *oral history* dari perempuan-perempuan Aceh yang pernah belajar di pendidikan madrasah dan melanjutkan studinya di luar daerah. Adapun ruang lingkup pembahasan tulisan ini akan

⁴ Evelyn Suleeman. 2009. *Inong Aceh di Tanah Nusanantara*. Jakarta: CIDA, UNIFEM, UNDP, Badan PP dan PA, BRR NAD-Nias dan IHS, h.40.

dimulai dengan melihat kembali keterlibatan perempuan dalam dunia pendidikan di Indonesia, kemudian akan dilanjutkan dengan melihat sejarah partisipasi perempuan Aceh dalam pendidikan madrasah. Selanjutnya artikel ini akan menganalisis faktor-faktor yang mendorong perempuan Aceh turut berpartisipasi dalam dunia pendidikan khususnya pendidikan madrasah.

II. PEREMPUAN DALAM DUNIA PENDIDIKAN DI INDONESIA

Pada awal abad ke-20 telah mulai muncul gerakan perempuan di Indonesia, baik itu dari golongan nasionalis maupun organisasi keagamaan. Kemunculan gerakan perempuan tidak dapat dilepaskan dari diperkenalkannya pendidikan sekolah untuk perempuan sebagai konsekuensi dari kebijakan politik etis Belanda.⁵ Kebijakan politik etis diadopsi pemerintah Hindia Belanda pada 1901 bertujuan untuk meningkatkan standar kehidupan masyarakat jajahannya. Salah satu bagian dari kebijakan politik etis Belanda adalah mendirikan sekolah-sekolah yang diperuntukkan bagi penduduk pribumi. Meskipun sekolah yang didanai pemerintah Hindia Belanda mengalami peningkatan dari segi kuantitas, namun sekolah-sekolah itu hanya diperuntukkan bagi anak laki-laki dan perempuan dari golongan-golongan tertentu saja. Dalam hal ini pemerintah Hindia Belanda lebih mengutamakan pendirian sekolah untuk golongan priyayi (kalangan elit) dan peranakan eurasia.⁶ Akibat penerapan politik etis telah banyak perempuan yang berhasil mengenyam pendidikan dan sebagian diantara mereka menjadi pendiri sekolah-sekolah untuk perempuan.

Namun demikian kebijakan pendidikan untuk kalangan pribumi yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda tidak dapat dilepaskan dari permohonan Kartini secara pribadi untuk mem-

⁵ Sukanti Suryochondro. 1984. *Potret Pergerakan Wanita di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.

⁶ Susan Blackburn. 2004. *Women and the State in Modern Indonesia*. USA: Cambridge University Press, h. 35-36; Lihat juga Frances Gouda. 2007. *Dutch Culture Overseas Praktik Kolonial di Hindia Belanda, 1900-1942*, (terj. Jugiarie Soegiarto dan Suma Riella Rusdiarti). Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, h. 137.

berikan pendidikan kepada masyarakat [Jawa].⁷ Kartini melalui korespondensi dengan kawan-kawannya yang berkebangsaan Belanda mengkomunikasikan kondisi perempuan pada zamannya.⁸ Pesan-pesan yang terkandung dalam surat-surat Kartini ini telah memengaruhi penduduk Hindia Belanda untuk memajukan kesejahteraan penduduk pribumi. Bahkan surat-surat Kartini yang mengharukan, terutama yang dikirimkan kepada Rosa Manuela Abendanon-Mandri, istri mantan Direktur Pendidikan, Agama dan Industri Hindia Belanda, Mr. Jacques Henry Abendanon, disunting secara selektif dan diterbitkan pada 1911 di negeri Belanda dengan judul, *Door duisternis tot licht* (Habis Gelap Terbitlah Terang). Royalti buku tersebut digunakan untuk mendanai pendirian Yayasan Kartini pada 1913, yang pada 1916 telah membuka tujuh sekolah swasta pada berbagai daerah di pulau Jawa.⁹

Sementara itu Dewi Sartika dengan semangat yang sama telah berhasil mendirikan Sekolah Istri di Bandung pada 1904. Sekolah ini didirikan dengan tujuan untuk mengajarkan anak-anak perempuan tentang pelajaran yang berkaitan dengan tugas-tugas sebagai istri. Kurikulum yang diajarkan di sekolah ini adalah materi yang berkaitan dengan memasak, mencuci, menggosok dan sebagainya. Pada tahun 1910 berganti nama dengan Sekolah Keutamaan Istri.¹⁰ Selanjutnya Sutartinah atau dikenal juga dengan Nyi Hajar Dewantara yang merupakan istri Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh perempuan yang turut memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pendidikan kaum perempuan di Yogyakarta. Sutartinah turut berpartisipasi secara langsung seba-

⁷ Susan Blackburn, *Women*, h. 36.

⁸ A. Suhaenah Suparno. 2001. "Wanita dan Pendidikan: Kasus Indonesia", dalam buku M. Atho Mudzhar, et al, (ed.). *Wanita dalam Masyarakat Indonesia, Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, h. 328.

⁹ Untuk lebih jelasnya baca Frances Gouda, *Dutch*, h. 151-152.

¹⁰ Hayati Nizar. 2002. "Profiles of Women Leaders and the History of Women's Organization in Modern Indonesia (1890-1945), dalam buku M. Atho Mudzhar, et all, (ed.). *Women in Indonesian Society: Acces, Empowerment, and Oportunity*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, h. 73.

gai pemimpin dan guru dalam sekolah Perguruan Nasional Taman Siswa yang didirikan suaminya pada 1922. Bahkan Sutartinah atau juga dikenal dengan Nyi Hajar Dewantara memiliki tanggung jawab khusus untuk mengkampanyekan pendidikan bagi kaum perempuan.¹¹

Di samping itu Nyai Ahmad Dahlan atau yang bernama Siti Walidah adalah salah seorang tokoh perempuan yang memperjuangkan pendidikan bagi kaum perempuan dari kalangan organisasi Islam yaitu Muhammadiyah. Siti Walidah membantu suaminya Kyai H. Ahmad Dahlan memberi pengajaran pendidikan bagi kaum perempuan di Yogyakarta. Bahkan pada 1914, Siti Walidah mendirikan sekolah berasrama khusus bagi perempuan. Kurikulum yang diajarkan di sekolah ini adalah materi pelajaran yang berkaitan dengan pengenalan ajaran agama Islam dan belajar membaca. Selain itu Siti Walidah juga aktif dalam kegiatan Muhammadiyah yang didirikan suaminya. Pada 1923, Siti Walidah mendirikan organisasi Aisyiyah yang merupakan divisi perempuan dari organisasi induk Muhammadiyah.¹²

Untuk daerah Sumatera Barat terdapat dua tokoh perempuan yang memiliki peran sangat penting dalam memajukan pendidikan kaum perempuan yaitu Rahmah El-Yunusiah dan Rasuna Said. Rahmah El-Yunusiah mengembangkan program pendidikan modern bagi perempuan yang mengintegrasikan spirit Islam melalui pendirian Sekolah Diniyah Putri pada 1923, sementara Rasuna Said mendirikan Kursus Puteri yang bertujuan untuk mengajarkan membaca bagi anak perempuan dan sekolah Perguruan Puteri untuk melatih guru perempuan di Bukit Tinggi. Rahmah dan Rasuna telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk memperjuangkan harkat dan martabat kaum perempuan. Rahmah mengfokuskan dirinya untuk meningkatkan pendidikan kaum perempuan yang pada masa itu bertentangan dengan tradisi masyarakat setempat yang melarang anak mereka untuk pergi sekolah. Sedangkan Rasuna lebih banyak memperjuangkan

¹¹ Susan Blackburn, *Women*, h. 50.

¹² Hayati Nizar, "Profiles of Women", h. 77.

emansipasi wanita dan kesetaraan gender melalui jalur politik dan pendidikan.¹³

Untuk daerah Aceh terdapat tokoh perempuan dalam bidang pendidikan yang bernama Teungku Fakinah. Teungku Fakinah adalah seorang pejuang perempuan Aceh dan juga pimpinan *dayah* yang cukup terkemuka sejak tahun 1873. Pada awal mulanya *dayah* itu didirikan oleh suaminya dan kemudian mereka pimpin secara bersama. Teungku Fakinah (Teungku Faki) ikut mengajar murid-murid *dayah* tersebut bersama suaminya, khususnya murid perempuan. Ketika suaminya meninggal, Teungku Fakinah mengambil alih kepemimpinan *dayah* tersebut sampai akhirnya tutup usia pada tahun 1903 dan dikuburkan dalam kompleks *dayahnya*.¹⁴

Selain itu terdapat seorang lagi tokoh perempuan Aceh yang memperjuangkan pendidikan kaum perempuan pasca kemerdekaan negara Republik Indonesia yaitu Teungku Ainal Mardhiah Ali. Prinsip yang selama ini dipegang teguh Teungku Ainal Mardhiah adalah perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki untuk mendapatkan pendidikan. Tekad Teungku Ainal Mardhiah untuk mencerdaskan dan meningkatkan pendidikan masyarakat Aceh umumnya, perempuan Aceh khususnya, telah berhasil diwujudkan melalui pendirian Yayasan Cut Meutia pada 1953. Melalui yayasan ini Teungku Ainal Mardhiah telah berhasil mendirikan sekolah-sekolah, perguruan tinggi, dan asrama putri.¹⁵

¹³ *Ibid*, h. 71.

¹⁴ Ainal Mardiah Aly. 1980. "Pergerakan Wanita di Aceh Masa Lampau Sampai Kini", dalam buku Ismail Suny, *Bunga Rampai tentang Aceh*. Jakarta: Aksara, 305-311; Ismuha, *op.cit.*, h. 50-54. Eka Srimulyani (2009), "Menganalisa Kepemimpinan Perempuan dalam Pesantren dan Dayah", dalam Eka Srimulyani & Inayatillah (ed.). *Perempuan dalam Masyarakat Aceh: Memahami Beberapa Persoalan Kekinian*. Banda Aceh: LOGICA – ARTI, h. 215.

¹⁵ Darmayulis. 1993. *Teungku Ainal Mardhiah Ali: Pejuang Pendidikan di Aceh*. Banda Aceh: Fakultas Adab IAIN Ar-Raniry; Nuraini. 2008. "Teungku Ainal Mardhiah Ali : Pejuang Kesetaraan Gender di Aceh", dalam Sehat Ihsan Shadiqin, (ed.), *Ensiklopedia Pemikiran Ulama Aceh III*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press.

Meskipun pada mula didirikan lembaga pendidikan, baik itu sekolah maupun madrasah, jumlah murid perempuan masih sedikit¹⁶ tetapi pada perkembangan selanjutnya mengalami peningkatan bersamaan dengan keberhasilan negara Indonesia memproklamkan kemerdekaannya. Situasi politik Indonesia yang kondusif pasca kemerdekaan telah mendorong peningkatan taraf perekonomian masyarakatnya yang berimplikasi pada peningkatan pendidikan yang berhasil dienyam masyarakatnya. Dalam hal ini jumlah murid yang belajar di pendidikan sekolah dan madrasah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, bahkan pada 1974 jumlah murid perempuan yang belajar di pendidikan madrasah lebih banyak dibandingkan murid laki-laki.¹⁷

III. PEREMPUAN DAN PENDIDIKAN MADRASAH DI ACEH DARI PERSPEKTIF SEJARAH

Istilah madrasah berasal dari perkataan bahasa Arab. Asal kata madrasah adalah *darasa* yang berarti belajar dan juga berarti pelajaran, *dars*. Dalam percakapan bahasa Arab istilah madrasah ini digunakan untuk semua jenis sekolah, baik itu sekolah yang hanya mengajarkan pelajaran agama Islam tradisional maupun sekolah yang hanya mengajarkan pelajaran umum (sekular).¹⁸ Madrasah sebagai tempat pembelajaran pendidikan Islam memiliki peranan yang sangat penting dalam mendidik seorang Muslim menjadi pakar dalam bidang agama yang sering disebut dengan ulama. Di samping itu madrasah juga mengajarkan dasar-dasar pendidikan Islam kepada anak-anak Muslim yang dapat digunakan untuk kehidupan mereka. Sehingga madrasah merupakan suatu alat untuk menyebarkan tradisi Islam (pendidikan Islam) kepada setiap generasi.¹⁹

Dalam sejarah pendidikan Islam, madrasah memiliki peran yang sangat penting sebagai institusi belajar umat Islam selama pertumbuhan dan perkembangannya. Pemakaian istilah madrasah

¹⁶ Frances Gouda, *Dutch*, h. 142-144.

¹⁷ Evelyn Suleeman, *Inong*, h. 40.

¹⁸ Farish A. Noor, et al, (eds.), "Behind the Walls", h. 9

¹⁹ *Ibid*, h. 9.

secara definitive baru muncul pada abad ke-11. Penjelmaan istilah “madrasah” merupakan transformasi dari masjid ke madrasah.²⁰ George Makdisi menjelaskan bahwa madrasah merupakan transformasi institusi pendidikan Islam dari masjid ke madrasah terjadi secara tidak langsung melalui tiga tahap; pertama: tahap masjid, kedua: tahap kompleks masjid-khan, dan ketiga: tahap madrasah.²¹

Meskipun secara historis tumbuh dan berkembangnya madrasah dalam sejarah dunia Islam jauh sebelum abad ke-10 M tetapi eksistensi madrasah dalam tradisi pendidikan Islam di Indonesia tergolong fenomena modern karena dimulai sekitar awal abad 20 M. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam berfungsi menghubungkan sistem lama yaitu sistem pendidikan *dayah*²² dengan sistem baru yang diperkenalkan oleh pemerintah Hindia Belanda²³ dengan jalan mempertahankan nilai-nilai lama yang masih baik dan masih dapat dipertahankan dan mengambil sesuatu yang baru dalam bidang ilmu, teknologi dan ekonomi yang bermanfaat bagi kehidupan umat Islam. Oleh karena itu, isi

²⁰ Suwito dan Fauzan. *Sejarah Sosial*, h. 214.

²¹ George Makdisi. 1981. *The Rise of College*. Edinburgh: Edininburgh University Press, h. 27.

²² Istilah *dayah* berasal dari kata *zawiyah* yang berarti sudut atau pojok dalam bahasa Arab. Sebagai suatu institusi pendidikan, *zawiyah* yang berubah menjadi *dayah*, memang berasal dari pengajian-pengajian yang diadakan disudut-sudut masjid yang merupakan institusi pendidikan yang sangat awal dalam Islam. Dari pengajian-pengajian di sudut masjid inilah lahir institusi yang disebut dengan *zawiyah*. Dalam bahasa Aceh, istilah *zawiyah* akhirnya berubah menjadi *dayah* kerana pengaruh bahasa Aceh yang sebenarnya tidak memiliki bunyi “z” dan cenderung memendekkan. *Dayah* adalah institusi pendidikan tinggi Islam yang merupakan lanjutan dari institusi pendidikan *rangrang*. Pendidikan *dayah* sama dengan pendidikan pesantren di Jawa dan surau di Sumatera Barat. Lihat Safwan Idris. 2002. “Mengemban Amanah Allah: Reaktualisasi Syariat Islam dan Masa Depan Pendidikan di Aceh” dalam buku Fairus M. Nur Ibr, (ed.), *Syariat di Wilayah Syariat Pernik-pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, h. 12-13

²³ Farish A. Noor, et al, (eds.), “Behind the Walls”, h. 14.

kurikulum madrasah pada umumnya adalah apa yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan Islam tradisional (*dayah*) ditambah dengan beberapa materi pelajaran yang disebut dengan ilmu-ilmu umum (sekolah).²⁴

Berdasarkan data sejarah, ada dua faktor yang menjadi latar belakang pertumbuhan madrasah di Indonesia secara umum dan Aceh pada khususnya, yaitu:

1. Faktor Pembaharuan Islam

Dalam tradisi pendidikan Islam di Indonesia, kemunculan dan perkembangan madrasah tidak dapat dilepaskan dari gerakan pembaharuan Islam. Gerakan pembaharuan Islam masuk ke Indonesia melalui orang-orang Indonesia yang melakukan perjalanan haji ke Mekkah. Mekkah tidak hanya menjadi ritual pelaksanaan haji semata tetapi juga menjadi pusat pembelajaran bagi para intelektual muslim dan pelajar-pelajar yang berdatangan dari seluruh penjuru dunia.²⁵ Sekembali dari perjalanan haji, mereka mulai menyebarkan pengetahuan yang diperoleh selama disana kepada masyarakat sekitarnya. Dengan demikian eksistensi gerakan pembaharuan Islam di Indonesia diawali oleh usaha sejumlah tokoh intelektual muslim dan kemudian dikembangkan oleh organisasi-organisasi Islam di seluruh Indonesia, baik itu di pulau Jawa, Sumatera maupun di Kalimantan.²⁶

Bagi kalangan para pembaharu, pendidikan dipandang sebagai aspek yang strategis dalam membentuk pandangan keislaman masyarakat. Oleh karena itu untuk melakukan pembaharuan terhadap pandangan dan tindakan masyarakat mengenai pemahaman ajaran agama Islam dan praktek keislaman adalah dengan cara memperbaharui sistem pendidikannya. Ini merupakan faktor utama yang menyebabkan muncul dan berkembangnya madrasah pada awal abad 20 di Indonesia.

²⁴ Abasri, "Sejarah dan Dinamika", h. 290-291.

²⁵ Farish A. Noor, et al, (eds.), "Behind the Walls", h. 15.

²⁶ Untuk lebih jelas mengenai latar belakang tumbuh dan berkembangnya gerakan pembaharuan Islam di Indonesia, lihat Deliar Noer. 1995. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES.

Keberadaan organisasi-organisasi modernis Islam pada tingkat nasional di antaranya Serikat Islam, Muhammadiyah dan Al-Irsyad yang cabang-cabangnya juga berdiri di Aceh telah membawa angin baru terhadap sistem pendidikan keagamaan di daerah Aceh. Selain itu pengaruh modernisme Islam di Aceh juga dimunculkan melalui putra-putra Aceh yang pernah belajar pada sekolah-sekolah Agama di daerah Minangkabau, Timur Tengah dan lainnya. Dimana pada tahun 1938, jumlah pelajar Aceh yang ada di Minangkabau diperkirakan mencapai 1000 orang dan kebanyakan bersekolah di Sumatra Thawalib.²⁷

Di samping itu munculnya pendidikan madrasah di Aceh juga dipengaruhi dari pesan-pesan Ayah Hamid yang merupakan pemimpin organisasi Sarekat Islam (S.I.) di Aceh yang melarikan diri ke Mekkah. Pesan-pesan Ayah Hamid dikirim melalui surat kabar *Umul Qura* kepada Teungku Haji Abdullah Ujung Rimba yang berisi anjuran supaya para ulama mengadakan pembaharuan terhadap sistem pendidikan Islam.²⁸ Selama ini teungku-teungku di *dayah* hanya pasif saja menunggu datangnya murid dan tidak ada usaha untuk mencari murid. Sistem belajar yang digunakan masih sistem halaqah serta teungku mengajarkan pelajarannya tanpa memakai alat pembantu. Menurut Ayah Hamid, kalau model pembelajaran tersebut masih tetap dipertahankan maka suatu saat nanti *dayah-dayah* di Aceh akan kosong dan akibatnya kita akan kehabisan ulama. Oleh karena itu, Ayah hamid menganjurkan supaya didirikan madrasah-madrasah dengan sistem belajarnya menggunakan bangku dan papan tulis.²⁹

²⁷ Lihat Ibrahim Alfian. 1995. "Kontak Kebudayaan dan Pendidikan Modern di Aceh pada Abad XX" dalam Badruzzaman Ismail, et al., (ed.), *Perkembangan Pendidikan di Daerah Istimewa Aceh*. Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah Propinsi Dista, h 393; Zakaria Akmad, et al. 1984. *Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Aceh*. Jakarta: Depdikbud, h. 57.

²⁸ Baihaqi A.K., "Ulama dan Madrasah", h. 166.

²⁹ Ismuha, "Ulama Aceh", h. 25.

2. Respon terhadap Politik Pendidikan Hindia Belanda

Eksistensi madrasah di Aceh tidak dapat dilepaskan dari persinggungan dengan sistem pendidikan yang diperkenalkan pemerintah Hindia Belanda kepada rakyat Aceh. Sebagai akibat dari proses politik, bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Nusantara ini, Aceh termasuk daerah yang terlambat menerima sistem pendidikan dari pemerintah Hindia Belanda. Pendidikan ini diperkenalkan pemerintah Hindia Belanda kepada rakyat Aceh baru pada permulaan abad 20, yang pada mulanya terbatas pada anak-anak golongan bangsawan saja (*uleebalang*). Kebijakan pemerintah Hindia Belanda untuk memperkenalkan sistem pendidikan mereka ke daerah Aceh didorong oleh visi politik etis dan politik asosiasi yang diperkenalkan C. Snouck Hurgronje.³⁰

Pada tahun 1900 mulailah diperkenalkan sistem pendidikan pemerintah Hindia Belanda yang diperuntukkan khusus kepada kelompok elite.³¹ Hampir bersamaan waktunya dengan diperkenalkannya pendidikan kepada anak-anak *Uleebalang*, pemerintah Belanda juga mulai memikirkan pendidikan kepada pemuda-pemuda Aceh lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk mendapat pegawai rendah (sesuai dengan tujuan politik etis) dan juga untuk mengurangi pengaruh dari para ulama dalam mengurangi kefanatikan mereka terhadap permusuhannya dengan Belanda (sesuai dengan konsepsi Snouck Hurgronje). Untuk mengatasi masalah ini pemerintah Hindia Belanda juga harus mendirikan sekolah-sekolah rendah atau sekolah-sekolah rakyat seperti halnya dengan sekolah-sekolah di pulau Jawa.³²

Sejak pada masa ini, di Aceh telah dikenal dua corak pendidikan, yaitu yaitu pendidikan yang diberikan sekolah-sekolah Barat sekuler yang tidak mengenal ajaran agama dan

³⁰ Baihaqi A.K., "Ulama dan Madrasah", h. 37.

³¹ Lihat Ibrahim Alfian, "Kontak Kebudayaan" h. 389 Zakaria Akmad, et al., *Sejarah Pendidikan*, h. 38.

³² Untuk lebih jelasnya baca Ibrahim Alfian, "Kontak Kebudayaan", h. 389; Muhammad Ibrahim, et al. 1978. *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*. Jakarta: Depdikbud, h. 136; Zakaria Akmad, et al., *Sejarah Pendidikan*, h. 38-45.

pendidikan agama yang diberikan *dayah*.³³ Pendidikan *dayah* dan pendidikan sekolah merupakan suatu pertentangan yang membentuk tesis dan antitesis dalam perkembangan pendidikan di Aceh. Dalam menghadapi pertentangan ini muncullah usaha mencari sintesa. Dengan cara memasukkan pendidikan umum pada sekolah agama dan memasukkan pendidikan agama pada sekolah umum.³⁴ Dari usaha tersebut lahir lembaga pendidikan model madrasah yang digerakkan para ulama pembaharu Aceh. Para pembaharu ini mencoba untuk mengkompromikan antara keinginan rakyat untuk mendapatkan pendidikan agama dengan kenyataan bahwa pendidikan model Belanda tidak bisa dilakukan.³⁵

Keadaan ini telah mendorong kaum Ulama Aceh untuk mengadakan pembaharuan terhadap sistem pendidikan agama yang telah lama mereka anut, yaitu dari sistem *meunasah*, *rangrang*, dan *dayah* yang tradisional kepada sistem madrasah yang modern. Di sini mulai diperkenalkan cara belajar baru yang berbeda dengan sistem lembaga pendidikan tradisional dengan memperluas materi pelajaran dan mempergunakan metode-metode pembelajaran modern.³⁶ Materi pelajaran diperluas, antara lain dengan memasukkan beberapa pelajaran umum di samping pelajaran agama yang merupakan pelajaran pokok. Selain itu sistem pendidikan yang diajarkan di madrasah sudah menggunakan bangku, papan tulis dan alat-alat sekolah lainnya.³⁷

Adapun lembaga pendidikan keagamaan yang disebut madrasah pertama kali di Aceh adalah Madrasah al-Khairiyah yang didirikan oleh Tuanku Raja Keumala dengan mengambil tempat di Masjid Raya Baiturrahman Kutaraja. Sebagai pimpinannya yang pertama ditunjuk Teungku Syekh Muhammad Saman Siron yang

³³ Muhaimin. 2003. *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*. Surabaya: Pustaka Pelajar, h. 70.

³⁴ Muhaimin, *Wacana*, h.71,

³⁵ Safwan Idris, "Mengemban Amanah Allah", h. 16.

³⁶ Antony Reid. 1979. *The Blood of the People: Revolution and the end of Traditional Rule in Northern Sumatra*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, h. 23..

³⁷ Lihat Zakaria Akmad, et al., *Sejarah Pendidikan*, h. 57-58.

pernah belajar di Timur Tengah (Mekkah).³⁸ Namun pengaruh modernisme Islam pada pendidikan madrasah baru mulai jelas kelihatan pada Madrasah Perguruan Islam di Seulimum yang didirikan Teungku Abdul Wahab pada 1926. Kemudian usaha pendirian lembaga-lembaga pendidikan tersebut, diikuti pula di tempat-tempat lain di daerah Aceh seumpama jamur yang tumbuh di musim hujan. Pada 1927 didirikan madrasah Al-Irsyad di Lhokseumawe, sebagai cabang Al-Irsyad Surabaya yang dipimpin Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Bersamaan dengan itu di Idi (Aceh Timur) didirikan pula Madrasah Ahlussunnah Wal Jamaah yang dipimpin oleh Said Husen. Kemudian madrasah ini diubah menjadi Madrasah Nahdatul Islam yang disingkat MADNI.³⁹

Pada 1930 Teungku Syaikh Ibrahim Lamnga bersama dengan Teungku Main *Uleebalang* Montasiek, mendirikan Jamiah Diniyah al-Montasiah disingkat Jadam, di Montasiek dengan H. Muhammad Arief, pendatang asal Minangkabau yang pernah di Darul Ulum, Kairo sebagai pimpinan madrasah. Selain dari pada itu Teungku Hasbalah Indrapuri (1888-1970) mendirikan Madrasah Hasbiyah di Indrapuri pada 1927 dan Madrasah Diniyah di Montasiek.⁴⁰ Di daerah Pidie, pelopor agama adalah Teungku M. Daud Beureueh dengan dibantu oleh Teungku Abdullah Ujong Rimba, yang mendirikan Jamiatuddiniyah di Peukan Pidie, Sigli, pada 1929. Dua tahun kemudian dengan bantuan *Uleebalang* Mukim II Pineung, T. Bentara H. Ibrahim, didirikan pula Madrasah as-Sa'adah al-Abadiyah di Blang Paseh Sigli. Di Aceh Utara dengan bantuan *Uleebalang* Peusangan, Teuku Chik M. Johan Alamsyah, Teungku Abdurrahman *Meunasah* Meucap (1900-1949) membangun Perguruan Al-Muslim di Matang Gelumpang Dua pada tahun 1929. Ulama ini bersama dengan Teungku Syaikh Ibrahim berkunjung ke Sumatera Barat untuk menyaksikan sendiri perkembangan sekolah-sekolah agama di sana.⁴¹ Pada tahun 1930-an perkembangan lembaga-lembaga pendidikan madrasah

³⁸ Ismuha, "Ulama Aceh", h. 22.

³⁹ *Ibid*, h. 59.

⁴⁰ Ibrahim Alfian, "Kontak Kebudayaan" h. 394.

⁴¹ *Ibid*, h. 394-395.

di seluruh Aceh terus meningkat, sehingga pada periode itu dapat disebutkan sebagai tahun pembangunan sekolah-sekolah agama di Aceh.⁴²

Pendirian pendidikan madrasah di Aceh telah memberikan peluang yang sama bagi anak perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dalam pendidikan madrasah baik itu sebagai murid maupun sebagai guru. Berdasarkan data sejarah menunjukkan bahwa perempuan Aceh telah terlibat dalam pendidikan madrasah sejak awal mula didirikan. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan yang muncul dari sekelompok golongan yang dipelopori Teungku Muhammad Amin Jumhoh Aceh Pidie yang mengharamkan laki-laki mengajar kaum perempuan.⁴³ Pernyataan ini menunjukkan bahwa pendidikan madrasah tidak hanya menerima anak laki-laki sebagai murid tetapi juga anak perempuan, meskipun tidak dapat dipungkiri terdapat juga madrasah yang didirikan khusus untuk laki-laki.

Selain itu isi ceramah Teungku Hasbalah Indrapuri dalam acara Tabligh Akbar di Kutaraja pada 1-2 Oktober 1936 juga memperkuat analisis tentang keterlibatan perempuan pada awal munculnya pendidikan madrasah. Dalam kesempatan tersebut Teungku Hasbalah Indrapuri menyatakan bahwa Nabi Besar Muhammad saw menyuruh sahabat-sahabatnya menuntut ilmu pada Sitti Aisyah istrinya. Jika orang laki-laki boleh berguru pada perempuan maka perempuan juga dibolehkan belajar pada orang laki-laki.⁴⁴ Hal ini menunjukkan bahwa pada masa itu telah terdapat ulama-ulama Aceh yang memperjuangkan pendidikan bagi kaum perempuan. Upaya ulama-ulama Aceh untuk memberikan kesempatan pendidikan pada kaum perempuan tidak

⁴² Uraian lebih lengkap tentang berdirinya madrasah-madrasah di Aceh, lihat A. Hasjmy. 1978. *Bunga Rampai Revolusi dari Tanah Aceh*, Jakarta: Bulan Bintang, h. 95-99. Zakaria Akmad, et al., *Sejarah Pendidikan*, h 61-65.

⁴³ Ismail Yakub. 1980. "Gambaran Pendidikan di Aceh Sesudah Perang Aceh – Belanda Sampai Sekarang", dalam buku Ismail Suny, *Bunga Rampai tentang Aceh*. Jakarta: Aksara, h. 345.

⁴⁴ *Ibid*, h. 348.

hanya sebatas ide atau gagasan tetapi juga diwujudkan dalam suatu keputusan yang dikenal dengan keputusan *Keudahsingel*. Keputusan ini dibuat dalam pertemuan *Keudahsingel* pada 12 Oktober 1936 di Kutaraja (Banda Aceh) yang memutuskan bahwa orang perempuan berguru kepada orang laki-laki itu tidak ada halangan dan tidak tercegah secara syara.⁴⁵

Sementara itu partisipasi perempuan dalam pendidikan madrasah dapat dilihat melalui biografi Ainal Mardhiah Ali yang pernah belajar di madrasah Jamiah Diniyah Al-Montasiah (Jadam) di kawasan Montasik Aceh Besar pada 1934.⁴⁶ Fakta ini menunjukkan bahwa sebelum munculnya keputusan *Keudahsingel* telah ada perempuan yang belajar di pendidikan madrasah. Partisipasi perempuan dalam dunia pendidikan madrasah di Aceh bukanlah suatu hal yang aneh karena perempuan Aceh telah terlibat dalam dunia pendidikan sejak sebelum munculnya pendidikan madrasah. Dimana data sejarah telah menunjukkan bahwa dari sejak awal anak perempuan sudah mendapat kesempatan untuk belajar di lembaga pendidikan Islam tradisional yang ada di Aceh. Tidak hanya itu, dalam tulisan Snouck Hurgronje juga disebutkan bahwa pengajaran di lembaga pendidikan Islam tradisional dilakukan baik oleh guru laki-laki maupun guru perempuan.⁴⁷ Namun pada periode berikutnya, dinamika yang terjadi dalam lembaga pendidikan Islam tradisional di Aceh banyak terinterupsi dengan kehadiran kolonialisme di Aceh yang membuat fokus dan perhatian masyarakat dan para ulama ke arah perang mempertahankan negeri.⁴⁸

Di samping itu, perempuan Aceh tidak hanya diberi peluang untuk mengenyam pendidikan madrasah yang ada di sekitar tempat tinggal mereka tetapi juga diberikan kebebasan untuk melanjutkan pendidikannya jauh dari tempat mereka berdomisili. Dalam hal ini banyak perempuan Aceh yang meninggalkan

⁴⁵ *Ibid*, h. 350.

⁴⁶ Darmayulis, *Teungku Ainal*, h. 12.

⁴⁷ C. Snouck Hurgronje. 1906. *The Atjehnese*, Vol. II, Leiden: E.J. Brill, h. 4.

⁴⁸ Eka Srimulyani, "Menganalisa", h. 216.

kampungnya untuk menuntut ilmu di daerah perkotaan. Berdasarkan data *oral history* menunjukkan bahwa pasca kemerdekaan negara RI banyak perempuan Aceh yang menuntut ilmu ke luar daerah Aceh, seperti Medan, Padang, Jakarta, Yogyakarta, dan kota besar lainnya.⁴⁹

Partisipasi perempuan Aceh dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan madrasah, tidak menjadikan situasi konflik sebagai penghalang bagi mereka untuk menuntut ilmu. Justru menurut informasi dari salah seorang informan menceritakan bahwa orang tuanya menyuruh dia untuk sekolah Diniyah Putri di Sumatera Barat pada 1954 karena pecahnya pemberontakan DI/TII (Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia) yang dipimpin Teungku Daud Beureueh.⁵⁰ Lain halnya dengan pengalaman Ainal yang terpaksa harus mengungsi ke Bukit Singkalang ketika sedang melanjutkan pendidikannya di PGAA (Pendidikan Guru Agama A) Putri yang terdapat di Padang, Sumatera Barat, karena peristiwa pemberontakan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia). Peristiwa itu tidak mendorong orang tuanya untuk memintanya pulang ke Aceh tetapi semua keputusan mengenai kelanjutan pendidikannya terpulung pada dirinya sendiri.⁵¹

Walaupun partisipasi perempuan dalam pendidikan madrasah telah ada sejak awal pendiriannya tetapi jumlah mereka secara kuantitas masih lebih sedikit dibanding jumlah murid laki-laki. Sebagaimana hasil wawancara mendalam dengan Fathimah Ali yang menyatakan ketika sekolah di MIN (Madrasah Ibtidaiyah Negeri) Mesjid Raya Banda Aceh pada 1945-an jumlah murid perempuan yang sekelas dengannya hanya dua orang.⁵² Namun beberapa tahun kemudian jumlah murid perempuan yang belajar

⁴⁹ Semua informan yang diwawancarai menyatakan pernah melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi di luar daerah Aceh.

⁵⁰ Fathimah Muhammad, 67 tahun, pensiunan Dosen IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Temubual pada 5 Agustus 2009.

⁵¹ Ainal Mardhiah, 72 tahun, pensiunan Guru MTsN, Meulaboh, Aceh Barat. Wawancara pada 4 Juli 2009.

⁵² Fathimah Aly, 78 tahun, pensiunan Guru MIN, Banda Aceh. Wawancara pada 28 Juni 2009.

di pendidikan madrasah mengalami peningkatan. Ketika Ainal belajar di Sekolah Rendah Islam (SRI) Blang Balee Aceh Barat pada 1950-an, jumlah murid perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Murid yang belajar pada setiap kelasnya berjumlah sekitar 20 orang, 15 murid perempuan dan 5 murid laki-laki.⁵³ Bahkan pada 1974 sampai dengan 2006 jumlah murid perempuan yang belajar pada pendidikan madrasah di Aceh lebih banyak daripada murid laki-laki dibandingkan dengan pendidikan sekolah yang cenderung lebih banyak murid laki-laki daripada murid perempuan.⁵⁴

Meskipun jumlah perempuan yang belajar sebagai murid dan mengajar sebagai guru mengalami peningkatan dari tahun ke tahun secara kuantitas. Namun bila berbicara tentang kepemimpinan perempuan di madrasah secara kuantitas masih tergolong rendah. Meskipun jumlah guru perempuan lebih banyak dari laki-laki terutama pada madrasah level dasar dan menengah tetapi posisi kepala madrasah masih didominasi oleh laki-laki. Sehingga dapat dikatakan semakin tinggi tingkat pendidikan madrasah maka akan semakin sedikit jumlah perempuan yang duduk pada posisi pimpinan.

IV. PEREMPUAN DAN NILAI-NILAI KULTURAL MASYARAKAT ACEH

Kesempatan perempuan Aceh untuk mendapatkan pendidikan, khususnya pendidikan agama tidak terlepas dari pendapat sebagian besar masyarakat Aceh yang masih menganggap anak perempuan perlu mendapat pendidikan agama karena mereka kelak setelah dewasa dan menikah akan dapat mendidik anak-anak mereka sendiri.⁵⁵ Dengan bekal ilmu pengetahuan yang selama ini diperoleh dari madrasah diharapkan mereka dapat menjaga perilakunya dan menjadi *role mode* bagi anak-anaknya

⁵³ Ainal Mardhiah, 72 tahun, Pensiunan Guru MTsN, Meulaboh, Aceh Barat. Wawancara pada 4 Juli 2009.

⁵⁴ Untuk lebih jelasnya baca Evelyn Suleeman, *Inong*, h.40.

⁵⁵ T. Syamsuddin. 1988. "Persepsi Masyarakat terhadap Pendidikan di Kecamatan Montasik, Aceh Besar", dalam Kusman K. Mahmud, et.all, (ed.), *Nuansa-nuansa Pelangi Budaya*. Bandung: Pustaka Karsa Sunda, h. 305.

kelak. Pendapat sebagian masyarakat ini sesuai dengan teori fungsionalis strukturalis yang melihat lembaga pendidikan sebagai sarana untuk melanggengkan sistem masyarakat yang sudah berjalan harmonis. Dimana kehidupan masyarakat yang normal harus berfungsi dan berstruktur secara normal, sehingga akan melahirkan harmoni dalam kehidupan.⁵⁶

Kecenderungan orang tua untuk menyekolahkan anak perempuannya di pendidikan madrasah juga sangat dipengaruhi oleh identitas budaya Aceh yang sangat Islami.⁵⁷ Sebagaimana telah diketahui bahwa banyak unsur dari agama Islam yang terserap dalam membentuk tatanan sosial masyarakat Aceh sepanjang sejarah. Sehingga bagi masyarakat Aceh, agama dan budaya bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana adagium Aceh menyatakan *Hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut* yang maksudnya adalah hukum Islam (Syariat Islam) dengan hukum adat seperti zat dan sifat yang sulit untuk dipisahkan. Sehingga kemampuan perempuan dalam bidang pengetahuan ilmu agama Islam merupakan pengetahuan yang tertinggi bagi mereka. Dalam konteks ini pendidikan madrasah diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana pewarisan kebudayaan dari generasi tua kepada generasi muda.⁵⁸

Di samping itu harapan orang tua yang menginginkan anaknya menjadi seorang muslim yang paham ilmu agama selaras dengan tujuan pendirian madrasah yaitu untuk mewujudkan anak didik yang memiliki pengetahuan keislaman dan ilmu-ilmu lainnya serta dapat mengamalkan pengetahuan yang mereka miliki dalam

⁵⁶ Ace Suryadi dan Ecep Idris. 2004. *Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan*. Bandung: Genesindo, h. 51-52: Mansour Fakhir. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 31-32.

⁵⁷ Jacqueline Aquino Siapno. 2002. *Gender, Islam, Nationalisme, and the State in Aceh*. USA and Canada: RoutledgeCurzon, h. 139-140.

⁵⁸ Tedi Priatna. 2004. *Reaktualisasi Paradigma Pendidikan Islam Ikhtisar Mewujudkan Pendidikan Bernilai Ilahiah dan Insaniah di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, h. 25-26.

kehidupan sehari-hari.⁵⁹ Dalam hal ini kurikulum yang diajarkan pada pendidikan madrasah tidak bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma yang dianut masyarakat Aceh sehingga banyak orang tua yang mengirimkan anaknya ke madrasah khususnya anak perempuan. Para orang tua beranggapan bahwa dengan memasukkan anaknya ke madrasah maka mereka akan menjadi manusia religius dan memiliki bekal moral yang diperlukan untuk pergaulan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Motivasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya di pendidikan madrasah juga mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat, dalam bentuk memberikan tempat tinggal bagi perempuan yang melanjutkan pendidikannya jauh dari kampung halamannya, walaupun mereka tidak memiliki keterikatan tali persaudaraan. Sehingga pada masa dahulu sering ditemukan istilah saudara angkat, karena pernah tinggal atau menumpang di rumah seseorang selama dia melanjutkan studi.⁶⁰

Nilai-nilai kultural lain yang sering dipraktekkan masyarakat Aceh adalah tradisi merantau. Merantau atau dalam bahasa Aceh disebut dengan *meudagang* merupakan tradisi menuntut ilmu yang selama ini dianut masyarakat Aceh. Dimana tradisi seseorang dalam menuntut ilmu akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain.⁶¹ Meskipun tradisi ini biasanya dilakukan oleh para santri yang belajar dari satu *dayah* (pesantren) ke *dayah* (pesantren) yang lain dalam rangka menuntut ilmu untuk menjadi seorang ulama. Akan tetapi praktek itu juga tetap berlaku bagi masyarakat Aceh yang menuntut ilmu bukan di pendidikan *dayah*. Mereka akan berpindah dari satu tempat pendidikan ke tempat pendidikan yang lain untuk menuntut ilmu baik itu ilmu pengetahuan umum maupun agama. Tradisi *meudagang* yang dianut masyarakat Aceh secara turun temurun ini tidak hanya

⁵⁹ Azyumardi Azra. 2002. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan Demokratisasi*, Jakarta: Kompas, h. 88.

⁶⁰ Rasuna, 73 tahun, Ibu Rumah Tangga, Banda Aceh. Wawancara pada 26 Juni 2009.

⁶¹ C. Snouck Hurgronje, *The Atjehnese*, Vol. II, h. 26. James T. Siegel. 1969. *The Rope of God*, Barkeley, Los Angeles: University of California.

berlaku bagi kaum laki-laki tetapi juga kaum perempuan. Banyak perempuan Aceh yang meninggalkan kampung halamannya dengan tujuan untuk menuntut ilmu. Sebagaimana data hasil wawancara mendalam dengan perempuan-perempuan yang pernah melanjutkan pendidikan madrasah ke jenjang yang lebih tinggi menyatakan bahwa mereka tidak hanya diperbolehkan orang tuanya untuk menuntut ilmu di sekitar daerah Aceh tetapi juga di luar Aceh, seperti, Medan, Padang, Jakarta, Yogyakarta dan kota-kota lainnya.

V. PENUTUP

Simpulan yang dapat ditarik dari uraian sebelumnya adalah partisipasi perempuan Aceh dalam dunia pendidikan madrasah telah dimulai sejak berdirinya pendidikan madrasah di Aceh. Keterlibatan perempuan Aceh dalam dunia pendidikan madrasah ini menunjukkan bahwa perempuan telah memperoleh kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari tradisi masa lalu masyarakat Aceh yang telah memberikan pengajaran agama Islam sejak masih anak-anak.

Selain itu keterlibatan perempuan Aceh dalam dunia pendidikan Islam tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai keislaman yang mengakar kuat dalam masyarakat Aceh. Dimana sebagian masyarakat Aceh masih beranggapan bahwa memiliki kemampuan dalam bidang ilmu agama Islam merupakan pendidikan yang tertinggi. Hal ini juga berhubungan paralel dengan posisi perempuan yang akan menjadi *role mode* bagi anak-anaknya kelak setelah menikah dan mempunyai anak.

Di samping itu dalam kajian ini juga menemukan bahwa perempuan Aceh tidak hanya diperbolehkan untuk melanjutkan pendidikannya di sekitar daerah Aceh tetapi juga sampai di luar daerah. Bahkan ketika konflik melanda Aceh, banyak perempuan yang melanjutkan pendidikannya ke luar daerah, seperti Medan, Padang, Jakarta, Yogyakarta dan kota-kota besar lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi merantau dalam masyarakat Aceh tidak hanya milik kaum laki-laki tetapi tradisi ini juga lazim dilakukan oleh kaum perempuan.

SUMBER BACAAN

- Abasri (2007): "Sejarah dan Dinamika Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Nusantara: Surau, Meunasah, Pesantren dan Madrasah", dalam Samsul Nizar, (ed.), *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*. Jakarta, Kencana.
- Akmad, Zakaria, et al. (1984), *Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Aceh*, Jakarta: Depdikbud.
- Alfian, Ibrahim (1995): "Kontak Kebudayaan dan Pendidikan Modern di Aceh pada Abad XX" dalam Badruzzaman Ismail, et al., (ed.), *Perkembangan Pendidikan di Daerah Istimewa Aceh*, Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah Propinsi Dista.
- Aly, Ainal Mardiah (1980): "Pergerakan Wanita di Aceh Masa Lampau Sampai Kini", dalam buku Ismail Suny, *Bunga Rampai tentang Aceh*. Jakarta: Aksara.
- A. Hasjmy (1978): *Bunga Rampai Revolusi dari Tanah Aceh*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Azra, Azyumardi (2002): *Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan Demokratisasi*. Jakarta: Kompas.
- A. Noor, Farish, et al, (eds.) (2008): "Behind the Walls Re-Appraising the Role and importance of Madrasah in the World Today" dalam buku Farish A.Noor, et all, (eds.). *The Madrasa in Asia Political Activism and Transnational Linkages*, Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Baihaqi A.K. (1983): "Ulama dan Madrasah Aceh", dalam Taufik Abdullah, *Agama dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali.
- Blackburn, Susan (2004): *Women and the State in Modern Indonesia*, USA: Cambridge University Press.
- Darmayulis (1993): *Teungku Ainal Mardhiah Ali: Pejuang Pendidikan di Aceh*. Banda Aceh: Fakultas Adab IAIN Ar-Raniry.

- Fakih, Mansour (1996): *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gouda, Frances (2007): *Dutch Culture Overseas Praktik Kolonial di Hindia Belanda, 1900-1942*, (terj. Jugiarie Soegiarto dan Suma Riella Rusdiarti). Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Hurgronje, C. Snouck (1906): *The Atjehnese*, Vol. II, Leiden: E.J. Brill.
- Ibrahim, Muhammad, et al. (1978): *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*. Jakarta: Depdikbud.
- Idris, Safwan (2002): "Mengemban Amanah Allah: Reaktualisasi Syariat Islam dan Masa Depan Pendidikan di Aceh", dalam buku Fairus M. Nur Ibr, (ed.), *Syariat di Wilayah Syariat Pernik-pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD.
- Ismuha (1983): "Ulama Aceh dalam Perspektif Sejarah", dalam buku Taufik Abdullah, (ed.), *Agama dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Makdisi, George (1981): *The Rise of College*. Edinburgh: Edininburgh University Press.
- Muhaimin (2003): *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*. Surabaya: Pustaka Pelajar.
- Nizar, Hayati (2002): "Profiles of Women Leaders and the History of Women's Organization in Modern Indonesia (1890-1945), dalam buku M. Atho Mudzhar, et all, (ed.), *Women in Indonesian Society: Acces, Empowerment, and Oportunity*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
- Noer, Deliar (1995): *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Nuraini (2008): "Teungku Ainal Mardhiah Ali : Pejuang Kesetaraan Gender di Aceh", dalam Sehat Ihsan Shadiqin, (ed.), *Ensiklopedia Pemikiran Ulama Aceh III*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Reid, Antony (1979): *The Blood of the People: Revolution and the end of Traditional Rule in Northern Sumatra*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

- Siapno, Jacqueline Aquino (2002): *Gender, Islam, Nationalisme, and the State in Aceh*. USA and Canada: RoutledgeCurzon.
- Siegel, James T. (1969): *The Rope of God*, Barkeley, Los Angeles: University of California.
- Srimulyani, Eka (2009): "Menganalisa Kepemimpinan Perempuan dalam Pesantren dan Dayah", dalam Eka Srimulyani & Inayatillah (ed.), *Perempuan dalam Masyarakat Aceh: Memahami Beberapa Persoalan Kekinian*, Banda Aceh: LOGICA – ARTI.
- Suleman, Evelyn (2009): *Inong Aceh di Tanah Nusantara*. Jakarta: CIDA, UNIFEM, UNDP, Badan PP dan PA, BRR NAD-Nias dan IHS.
- Suryadi, Ace dan Ecep Idris (2004): *Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan*. Bandung: Genesindo.
- Suryochondro, Sukanti (1984): *Potret Pergerakan Wanita di Indonesia*, Jakarta: Rajawali.
- Suparno, A. Suhaenah (2001), "Wanita dan Pendidikan: Kasus Indonesia", dalam buku M. Atho Mudzhar, et al, (ed.), *Wanita dalam Masyarakat Indonesia, Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
- Suwito dan Fauzan (2005): *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- T. Syamsuddin (1988): "Persepsi Masyarakat terhadap Pendidikan di Kecamatan Montasik, Aceh Besar", dalam Kusman K. Mahmud, et.all, (ed.), *Nuansa-nuansa Pelangi Budaya*, Bandung: Pustaka Karsa Sunda.
- Yakub, Ismail (1980): "Gambaran Pendidikan di Aceh Sesudah Perang Aceh – Belanda Sampai Sekarang", dalam buku Ismail Suny, *Bunga Rampai tentang Aceh*. Jakarta: Aksara.